



Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Digitalisasi UMKM Melalui Aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok

Fatikhatur Rizkya¹, Santosa², Tri Ratna Rinayuhani³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit¹⁻³

Email Korespondensi: fatikhaturrizky24@gmail.com santosa@unim.co.id triratnarinayuhani@unim.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

Digital transformation has become a key factor in strengthening the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within an increasingly competitive global economy. This study aims to analyze the implementation of local government policies in promoting MSME digitalization through the Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) application in Simongagrok Village, Mojokerto Regency. This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, observations, and documentation, with data analyzed through an interactive model involving data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the TUMBAS application has positively impacted MSMEs by expanding market reach, improving marketing efficiency, and increasing revenue, despite persistent challenges such as limited digital literacy, insufficient human resources, and inadequate supporting infrastructure. The study highlights that the success of MSME digitalization requires synergy among local government, business actors, and the community, as well as continuous mentoring and capacity-building programs.

Keywords: MSME Digitalization, Policy Implementation, TUMBAS Application

ABSTRAK

Transformasi digital menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi global yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) di Desa Simongagrok, Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif dengan proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi TUMBAS telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, antara lain peningkatan akses pasar, efisiensi pemasaran, dan pertumbuhan pendapatan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan literasi digital, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta optimalisasi strategi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi UMKM, Implementasi Kebijakan, Aplikasi TUMBAS

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era digital saat ini menuntut berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk beradaptasi dengan cepat dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen peningkatan daya saing. UMKM telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data OECD (2023), integrasi digital pada sektor UMKM secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, peran UMKM semakin krusial dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Transformasi digital menjadi faktor kunci dalam memperluas kapasitas kompetitif UMKM di tengah tingginya dinamika pasar global. Menurut laporan World Bank (2024), penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan produktivitas dan mempercepat penetrasi pasar, khususnya bagi UMKM yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses konsumen lintas daerah dan negara. Namun, pada kenyataannya tingkat adopsi teknologi digital UMKM di Indonesia masih rendah, dengan hanya sekitar 26% UMKM yang telah memanfaatkan platform daring secara optimal. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan rendahnya akses terhadap informasi menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar digitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menekankan pentingnya inovasi berbasis teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi melalui berbagai program strategis, termasuk pendampingan UMKM, penyediaan infrastruktur digital, dan pemberian akses terhadap platform daring untuk pemasaran produk. Sejalan dengan temuan UNCTAD (2023), keberhasilan digitalisasi UMKM di negara berkembang memerlukan sinergi antara regulasi pemerintah, kesiapan teknologi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Sebagai bentuk respons terhadap perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meluncurkan aplikasi Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) pada tahun 2022. Aplikasi ini dirancang sebagai inovasi digital berbasis lokal untuk memfasilitasi pemasaran produk UMKM, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi transaksi secara daring. Studi OECD (2023) menegaskan bahwa inisiatif digital berbasis komunitas lokal seperti TUMBAS dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif sekaligus meningkatkan keterhubungan antara pelaku UMKM dengan konsumen. Kehadiran TUMBAS

diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi secara adaptif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi aplikasi TUMBAS tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan kapasitas sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta keterhubungan infrastruktur pendukung antarwilayah. Studi McKinsey (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat kolaborasi lintas aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, strategi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi secara efektif di kalangan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok, Kabupaten Mojokerto. Kajian difokuskan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan, serta mengidentifikasi sejauh mana aplikasi TUMBAS dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur kebijakan digitalisasi UMKM sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan strategi transformasi digital di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena sosial dan kebijakan publik secara komprehensif melalui interpretasi makna, persepsi, dan pengalaman para informan. Data penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, aparat pemerintah daerah, dan perangkat desa, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, laporan resmi, publikasi ilmiah, dan arsip digital terkait program TUMBAS. Teknik observasi digunakan untuk memahami proses penerapan aplikasi dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mempertimbangkan keterpaduan antaraktor serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keandalan dan kredibilitas hasil penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas strategi digitalisasi UMKM berbasis kebijakan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, berjalan secara bertahap dengan melibatkan aktor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga pelaku UMKM. Implementasi ini menggunakan kerangka teori Merilee S. Grindle (1980). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana, dan sumber daya*) (Khusufmawati et al., 2021)

Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan aktor menjadi salah satu faktor penentu utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Grindle (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak pernah berada dalam ruang yang netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh interaksi antaraktor dengan kepentingannya masing-masing. Dalam konteks implementasi aplikasi TUMBAS, terdapat keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran utama. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) berperan aktif melakukan sosialisasi, promosi, dan program insentif seperti gratis ongkir untuk memperkenalkan aplikasi ini. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aktor-aktor lokal, termasuk perangkat desa dan pelaku UMKM, memandang aplikasi TUMBAS sebagai wadah baru untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, sehingga kepentingan mereka sejalan dengan tujuan kebijakan (Entjaurau, Sumampow, & Undap, 2021).

Pemerintah Desa Simongagrok memperlihatkan dukungan yang konsisten terhadap implementasi kebijakan ini. Sekretaris Desa mengkonfirmasi bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2024 dengan memberikan tutorial penggunaan dan penjelasan manfaat aplikasi kepada masyarakat (wawancara, 28 Mei 2025). Dukungan ini mencerminkan adanya alignment kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong transformasi ekonomi digital.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Simongagrok mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kepentingan besar terhadap keberlangsungan aplikasi TUMBAS, khususnya karena sistem harga yang transparan tanpa adanya biaya admin. (wawancara 03 mei 2025). Hal ini telah sejalan dengan analisis Grindle bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan mampu mengakomodasi kepentingan aktor yang terlibat. Dengan demikian, adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil pelaku UMKM menciptakan sinergi yang positif, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan keberhasilan implementasi program digitalisasi UMKM melalui aplikasi TUMBAS (Grindle, 1980).

Tipe Manfaat

Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Suatu kebijakan yang dirasakan menguntungkan akan lebih mudah diterima dan mendapat dukungan luas. Implementasi aplikasi TUMBAS terbukti memberikan sejumlah manfaat langsung, baik bagi pelaku UMKM maupun masyarakat sebagai konsumen. Bagi pelaku UMKM, aplikasi ini membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan penghematan biaya promosi, serta menyediakan kanal penjualan baru di luar jalur konvensional. Hal ini sangat penting terutama di desa-desa dengan keterbatasan akses fisik terhadap pasar, seperti di Desa Simongagrok (Khusufmawati, Nurasa, & Alexandri, 2021). (Dwiyanto, 2021).

Lebih lanjut, manfaat juga dirasakan konsumen yang kini lebih mudah memperoleh produk UMKM lokal tanpa harus datang langsung ke lokasi penjual. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan signifikan, terutama dalam memesan makanan dan kebutuhan pokok yang sebelumnya sulit diakses karena keterbatasan layanan kurir. Aplikasi TUMBAS berhasil mengatasi hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala akses masyarakat terhadap layanan perdagangan online. Sekretaris Desa Simongagrok menekankan bahwa keberadaan aplikasi ini sangat menguntungkan masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan akses layanan kurir karena keterbatasan jarak (wawancara, 28 Mei 2025).

Implementasi TUMBAS telah mendorong literasi digital di kalangan pelaku UMKM, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kemampuan teknologi, khususnya bagi kelompok usia lanjut. Program tersebut telah menjadi katalis bagi transformasi perilaku ekonomi konvensional menuju digital.

Dengan demikian, aplikasi TUMBAS tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi waktu dan biaya. Hal ini diperkuat dengan pandangan Grindle bahwa kebijakan yang mampu memberikan manfaat luas akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktor sekaligus mendukung keberlanjutan program kebijakan digitalisasi UMKM.

Derajat Perubahan yang Diharapkan

Derajat perubahan dalam teori Grindle (1980) merujuk pada skala transformasi yang dihasilkan oleh kebijakan, baik dalam perilaku aktor maupun kondisi sosial-ekonomi. Pada konteks aplikasi TUMBAS, perubahan yang terjadi cukup signifikan. Pelaku UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan konvensional kini beralih ke pemasaran digital. Program gratis ongkir yang diluncurkan pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan volume transaksi secara nyata. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen dan produsen menuju pola interaksi ekonomi digital yang lebih modern (Khusufmawati et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perubahan juga terlihat dalam aspek sosial masyarakat Desa Simongagrok. Masyarakat yang awalnya terbatas dalam akses layanan digital kini mulai terbiasa menggunakan aplikasi TUMBAS untuk transaksi sehari-hari. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma ekonomi dari sistem tradisional menuju ekosistem digital. (Wawancara, 03 Mei 2025). Pelaku UMKM mulai mengadopsi sistem manajemen yang lebih terstruktur dengan memanfaatkan fitur-fitur digital dalam aplikasi TUMBAS. Hal tersebut mencerminkan evolusi dari usaha mikro dengan manajemen tradisional menuju small-scale enterprise dengan orientasi teknologi.

Dalam kerangka teori Grindle, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuan jangka pendek berupa perubahan perilaku, sekaligus membuka ruang bagi perubahan jangka panjang berupa peningkatan literasi digital dan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif (Grindle, 1980).

Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan publik memengaruhi kecepatan respons dan ketepatan strategi yang diambil. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada siapa yang mengambil keputusan, kapan keputusan diambil, dan bagaimana keputusan itu disosialisasikan ke tingkat bawah. Dalam kasus aplikasi TUMBAS, pengambilan keputusan dilakukan oleh Kepala DISPERINDAG Kabupaten Mojokerto sebagai inisiator utama. Keputusan ini lahir dari kebutuhan mendesak pada masa pandemi Covid-19, ketika UMKM mengalami penurunan drastis dalam pendapatan, sehingga digitalisasi dianggap sebagai solusi yang strategis. (Wawancara, 14 Mei 2025).

Meskipun inisiatif kebijakan bersifat top-down, implementasinya melibatkan multi level governance yang meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat. Pemerintah Desa Simongagrok berperan sebagai fasilitator lokal yang menyediakan infrastruktur dan akses untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. (Wawancara, 28 Mei 2025).

Keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung keputusan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Pemerintah desa berperan dalam memberikan fasilitas sosialisasi, pelatihan, dan juga menjembatani komunikasi dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kerangka teori Grindle, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh partisipasi aktor-aktor lokal yang relevan. Dengan adanya pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis kebutuhan lapangan, aplikasi TUMBAS berhasil memperoleh legitimasi dan dukungan luas, yang berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi UMKM di Mojokerto.

Pelaksana Program

Pelaksana program yang kompeten dan terorganisir merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks aplikasi TUMBAS, pelaksana utama adalah Disperindag Kabupaten Mojokerto yang

menginisiasi, menyusun, dan mengawasi jalannya program. Implementasi ini dilengkapi dengan sosialisasi, pelatihan teknis, serta kerja sama dengan organisasi lokal seperti HIPEMIKA (Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk mendukung operasional aplikasi, termasuk dalam penyediaan layanan kurir. Dengan adanya koordinasi lintas lembaga, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal (Khusufmawati et al., 2021).

Selain itu, perubahan juga terlihat dalam aspek sosial masyarakat Desa Simongagrok. Masyarakat yang awalnya terbatas dalam akses layanan digital kini mulai terbiasa menggunakan aplikasi TUMBAS untuk transaksi sehari-hari. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma ekonomi dari sistem tradisional menuju ekosistem digital. Dalam kerangka teori Grindle, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuan jangka pendek berupa perubahan perilaku, sekaligus membuka ruang bagi perubahan jangka panjang berupa peningkatan literasi digital dan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Serta infrastruktur lainnya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. (Khusufmawati et al., 2021). Dalam konteks aplikasi TUMBAS, sumber daya finansial untuk pengembangan, pemeliharaan aplikasi, dan program gratis ongkir diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi UMKM.

Namun, tantangan utama terletak pada sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital masyarakat. Pada kondisi Desa Simongagrok memperlihatkan bahwa tidak semua pelaku UMKM mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Sebagian besar masyarakat, terutama kalangan usai lanjut, masih mengalami kesulitan dalam mengadaptasi teknologi digital, sementara generasi muda dan ibu-ibu mudah reaktif mudah beradaptasi. (Wawancara, 03 Mei 2025).

Kesenjangan literasi digital ini mencerminkan perlunya khusus terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Program pelatihan harus dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang familiar dengan teknologi. Keterbatasan jumlah kurir yang belum menyebar ke seluruh kecamatan di Mojokerto juga menjadi tantangan dalam hal sumber daya operasional. Hal ini mempengaruhi efektivitas distribusi produk dan kepuasan pengguna, terutama di daerah yang memiliki pengguna terbanyak seperti Kecamatan Dawarblandong yang hanya dilayani oleh satu kurir aktif teknologi, agar mereka dapat beradaptasi dengan aplikasi TUMBAS secara optimal.

Analisis ini telah sejalan dengan teori Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, melainkan sangat

bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Grindle juga menekankan bahwa faktor sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas merupakan determinan utama dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok memperlihatkan keberhasilan yang signifikan berdasarkan analisis menggunakan Grindle. Kelima dimensi utama dalam teori tersebut telah terpenuhi dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek sumber daya manusia terkait literasi digital. Keberhasilan implementasi tersermin dari antusiasme tinggi pelaku UMKM, manfaat nyata berupa peningkatan penjualan dan perluasan pasar, perubahan signifikan dalam pola transaksi menuju digital, pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, serta pelaksanaan program yang didukung kolaborasi multiaktor. Aplikasi TUMBAS sudah berhasil menciptakan transformasi ekonomi lokal berbasis teknologi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, efisiensi aktivitas perdagangan, dan penciptaan ekosistem ekonomi digital pada tingkat desa. Meskipun demikian, optimalisasi dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, perluasan jangkauan wilayah, dan peningkatan infrastruktur teknologi masih diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif program ini secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) di Desa Simongagrok, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang positif meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan analisis menggunakan teori Merilee S. Grindle, penelitian ini menemukan bahwa kelima dimensi utama, yaitu kepentingan aktor, tipe manfaat, derajat perubahan, pengambilan keputusan, dan pelaksana kebijakan, telah terpenuhi secara substansial. Antusiasme pelaku UMKM, peningkatan penjualan, dan kesejahteraan masyarakat mencerminkan efektivitas aplikasi TUMBAS dalam memfasilitasi transformasi transaksi dari konvensional ke digital. Meskipun demikian, keterbatasan literasi digital, ketersediaan sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan, kebijakan digitalisasi UMKM melalui TUMBAS telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta menciptakan peluang lapangan kerja baru. Namun, optimalisasi pada aspek infrastruktur digital, sistem pembayaran, dan perluasan jangkauan wilayah perlu ditingkatkan agar dampak positif kebijakan ini dapat dimaksimalkan dan keberlanjutan program dapat terjamin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i1.307>
- Ardiansyah, R., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Capa, M., & Bireuen, K. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pisang molen coklat di Desa Meunasah Capa Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(5), 1–6.
- Firdaus, A., Rofi'i, A., Rohman, A. N., & Tsrif, M. (2024). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan daya saing dan tingkat penjualan di Swalayan Surya Ponorogo. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 107–115. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3481>
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung (Studi tentang kendaraan dinas operasional). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–724.
- Kusnadi, I. H., Natika, L., & Alsonia, D. O. (2020). Implementasi kebijakan pembinaan UMKM di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 2(2), 103–120. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i2.937>
- McKinsey & Company. (2023). *The state of SME digitalization in emerging markets*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/sme-digitalization>
- OECD. (2023). *SME digital transformation and innovation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/sme-digital-2023-en>
- Putra, T. W. A., Solechan, A., & Hartono, B. (2023). Transformasi digital pada UMKM dalam meningkatkan daya saing pasar. *Jurnal Informatika Upgris*, 9(1), 7–12. <https://doi.org/10.26877/jiu.v9i1.15096>
- Safitri, D., & Rusdin, R. B. (2024). Peran pemerintah Kota Palu dalam memberdayakan UMKM di Kota Palu. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 137–153.
- Simanungkalit, D. J., & Prasojo, E. (2020). Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan inovasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

tentang inovasi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(2), 1–9. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i2.1268>

UNCTAD. (2023). *Digital economy report 2023: Unlocking SME potential*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/digital-economy-report-2023>

World Bank. (2024). *Digital economy for inclusive growth*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/digital-economy>